

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya permintaan masyarakat akan laporan keuangan berkualitas dan berkaitan dengan pemerintahan yang baik semakin diperhatikan. Diperlukan adanya pergeseran paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang baru, baik dalam tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Untuk memastikan agar pengguna dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memahami sistem akuntansi, khususnya dalam akuntansi keuangan daerah (Ghozali 2018).

Gambaran konseptual yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bukti dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan haruslah informatif dan terbuka terhadap semua informasi. Agar memberikan informasi yang baik dan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, hal tersebut juga harus memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevan, bisa diandalkan, bisa dibandingkan, dan mudah dipahami (Tawaqal and Suparno 2017).

Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang keuangan entitas pelaporan, pengguna dapat menilai kinerja keuangan entitas tersebut, memahami tingkat risiko, dan menentukan kemungkinan

entitas tersebut dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka di masa depan serta membuat akan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya (Tawaqal & Suparno, 2017).

Laporan keuangan pemerintah memegang peranan yang sangat penting bagi pengguna LKPD, sehingga informasi yang dihasilkan haruslah berkualitas baik. Menurut Sumaryati *et al.*, (2020) untuk mencapai hal tersebut, suatu instansi harus memiliki kualitas sistem informasi, khususnya sistem informasi manajemen daerah. Menurut Lutfiati *et al.*, (2021) Laporan keuangan juga merupakan media yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dalam sektor privat maupun sektor publik tentang bagaimana suatu organisasi akan berjalan kedepannya. Dalam sektor publik yang menjadi fokus adalah instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Untuk itu, penting bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan agar dapat mudah dipahami penggunanya, mempunyai pengungkapan yang cukup, disajikan secara wajar, jujur apa adanya serta memenuhi karakteristiknya sebagaimana disyaratkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusrianti *et al.* 2021).

Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Para pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Akan tetapi, masing-masing pengguna laporan keuangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan. Misalnya, masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan pemerintah dalam rangka menilai akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan uang negara/ daerah, wakil rakyat yang membutuhkan laporan keuangan dalam rangka menilai pelaksanaan anggaran oleh eksekutif, lembaga pemeriksa yang membutuhkan laporan keuangan pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai auditor dan berbagai kebutuhan lainnya oleh pengguna yang berbeda. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CALK) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 revisi 2009).

Pada era globalisasi saat ini, instansi pemerintah daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam hal laporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Untuk mendukung peraturan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat di uji kebenarannya, sistem tersebut yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan. Sistem ini terdiri dari beberapa versi, namun yang berbasis akrual ialah versi 2.7 sebagai penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Hal ini dikarenakan dinamika perubahan regulasi yang bersifat dinamis dan fleksibel memiliki pengaruh penting terhadap setiap pengembangan aplikasi SIMDA keuangan, agar dapat mengikuti setiap perubahan regulasi dari masing-masing *stakeholder*.

Situs resmi BPKP menjelaskan bahwa aplikasi SIMDA keuangan dirancang dan dikembangkan oleh BPKP khususnya produk dari deputi IV yaitu bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Aplikasi SIMDA muncul setelah adanya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang pedoman umum perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu penerapan aplikasi SIMDA juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian *intern* pemerintah dan pengembangan SIMDA. (www.bpkp.go.id)

Kinerja aparatur daerah juga merupakan faktor yang dapat menjadi pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Kinerja aparatur pemerintah yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Profesionalisme para pegawai saat bekerja sangat penting agar kinerjanya maksimal dan memuaskan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparaturnya untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang tercermin dari bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai oleh BPK dan diberikan opini. Jika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, hal ini menandakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah tersebut telah disajikan dengan cara yang wajar dan berkualitas (Tawaqal & Suparno, 2017).

Adapun fenomena yang terjadi berdasarkan surat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan provinsi Aceh, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian *intern* maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kota lhokseumawe tahun anggaran 2022 yaitu, Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2022 tidak realistis mengakibatkan timbulnya utang belanja sebesar Rp39.806.720.922,76 dan pemanfaatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp37.567.275.063,95 yang akan membebani anggaran tahun berikutnya; Pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp236.396.150,00 dan membebani keuangan daerah sebesar Rp19.800.000,00; dan Kekurangan volume pekerjaan atas 37 paket kegiatan Belanja Modal pada lima SKPK mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.052.693.232,20 (LKJiP BPKD 2023).

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan dengan judul **“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPK Lhokseumawe)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti mengidentifikasi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPK Kota Lhokseumawe.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada SKPK Kota Lhokseumawe.

3. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kedepannya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu mengenai implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPK Kota Lhokseumawe.